

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan, tetapi kenyataannya selama ini pembangunan hanya ditunjukkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi, bukan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Artinya, tingkat pemerataan hasil pembangunan tidak diimbangi dengan pemerataan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap tiap negara. Salah satunya Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, dengan letak geografis yang cukup strategis, dan sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi, tidak membuat Indonesia menjadi salah satu Negara maju di dunia bahkan di asia.

Menurut Umiyati, (2014) apabila suatu daerah hanya diprioritaskan untuk pembangunan yang terkonsentrasi, maka kehidupan sosial, politik, dan ekonomi berkembang tidak merata dan pembangunan yang tidak seimbang akan mengakibatkan pembangunan kehidupan ekonomi, politik, dan sosial yang tidak seimbang, akan mengakibatkan pertumbuhan yang lemah. Oleh karena

itu, pembangunan harus mengikutsertakan peran masyarakat sebagai actor utama dan pihak yang akan merasakan pembangunan.

Paradigma pembangunan yang saat ini sedang berkembang adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dengan pembangunan manusia dan dapat dilihat dengan kualitas hidup manusia di setiap Negara. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya sangat membutuhkan modal usaha yang berkualitas agar dapat bisa menjadi modal usaha pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas pemerintah dapat bisa memberikan fasilitas untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Adapun kualitas SDM dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia dan dapat dipenuhi dengan berbagai kebijakan yaitu pembangunan kesehatan dengan memberikan perhatian dengan cara menerapkan hidup sehat, pembangunan pendidikan dengan cara arah pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang (Dewi et al., 2017))

Indeks Pembangunan Manusia merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan produktifitas suatu perekonomian, sehingga tingkat pendapatan juga meningkat. Meningkatnya pendapatan mencerminkan munculnya perbaikan dalam kehidupan masyarakat. Komponen yang dapat dihitung dari indeks harapan hidup, indeks standar hidup layak, dan indeks pendidikan. Dalam perhitungan indeks harapan hidup, indeks

standar layak dan indeks pendidikan akan melibatkan komponen ekonomi maupun non ekonomi, misalnya kualitas kesehatan, kualitas pendidikan dan kependudukan, sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah dianggap relevan untuk digunakan sebagai tolak ukur perekonomian suatu negara yang mengalami perkembangan baik di negara maju maupun negara berkembang.

Didalam ayat Al-Quran dan riwayat Tabi'in salah satu yang bisa dijadikan dasar untuk mengukur keberhasilan pembangunan bahwa pembangunan tidak semata-mata membangun fisik, tetapi juga suatu hal yang bersifat immaterial dan spiritual. Hal ini dapat dibuktikan pada Al-Quran surah Al-A'raaf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (QS Al-A’Raaf: 96)

Sebagai ilmu yang tidak terlepas dari nilai-nilai, ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang lebih komprehensif, tetapi terikat oleh nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ada beberapa prinsip dasar ekonomi Islam yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Prinsip ini juga sering disebut sebagai aksioma dalam

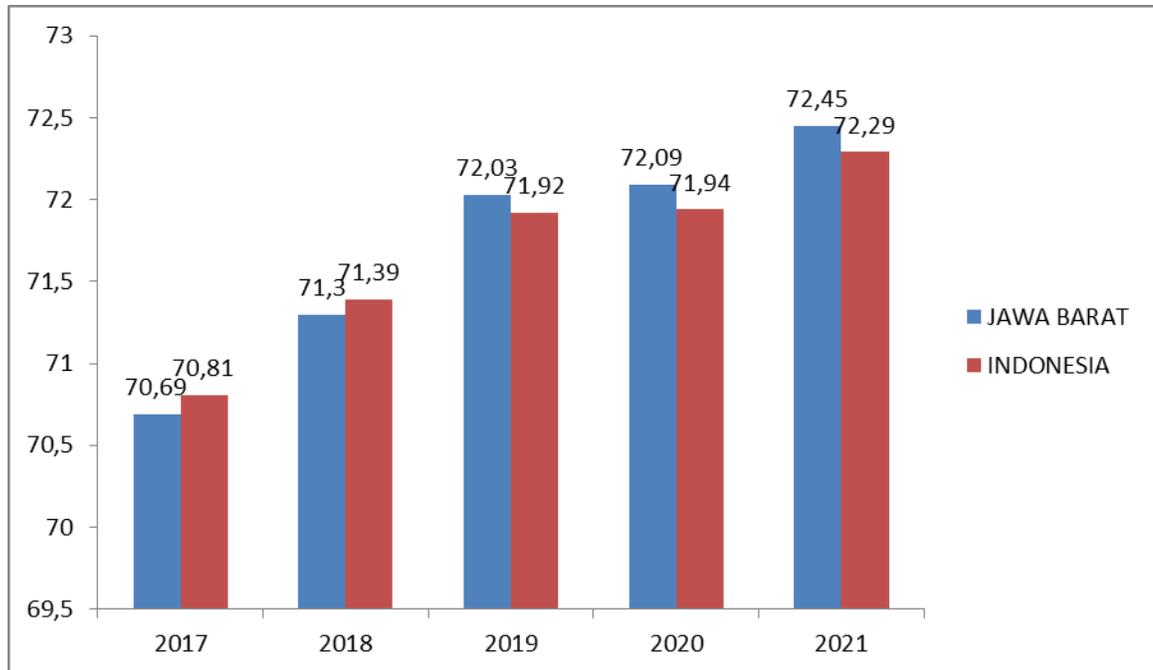
membangun ekonomi Islam baik sebagai bagian dari pedoman ilmiah maupun politik. Empat aksioma sering dihadirkan sebagai prinsip dasar ekonomi Islam salah satunya adalah keseimbangan (Al-Adl wa Al-Ihsan) ((Ahyani, 2016a)). Manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, di muka bumi ini tidak lain untuk menjadi rahmatan lil ‘alamin (Q.S. al-Ankabut [29]: 51), mafaat terbesar bagi alam.

Al-‘Adl mengacu pada hubungan timbal balik antara orang-orang dimana seseorang harus bertindak adil dan tidak merugikan baik dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan *ihsan* mengacu pada tanggung jawab individu dan masyarakat untuk memperhatikan orang-orang yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan suatu manfaat. Kedua faktor ini diharapkan menjadi tujuan untuk mencapai rahmatan lil ‘alamin dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan kesetaraan sosial secara keseluruhan.

Dalam sudut pandang islam, pembangunan harus didasarkan pada lima landasan filosofis, yaitu tauhid uluhiyyah, tauhid rubiyyah, al falah, Khilafah, dan tazkiyyah. Landasan filosofis adalah prinsip-prinsip yang harus tertanam kuat dalam islam dan bersumber dari sumber utama Islam, yaitu Al Qur’an dan As-Sunnah.

Tujuan pembangunan ekonomi setiap daerah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dan di Provinsi Jawa Barat selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan disetiap tahunnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1



(Sumber : BPS, 2022)

Gambar 1. 1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dan Provinsi Jawa Barat 2017-2021

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir secara berturut-turut, terhitung tahun 2017 sebesar 70,81 kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 71,39 dan terus meningkat pada tahun 2019 sebesar 71,92, pada tahun 2020 sebesar 71,94 kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 72,29.

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota yang merupakan provinsi dengan angka indeks pembangunan manusia kategori tinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) metode di Provinsi di Jawa Barat selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang meningkat disetiap tahunnya, seperti yang ditunjukkan dalam gambar 1.1.

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat mengalami perkembangan yang selalu meningkat disetiap tahun. Terlihat adanya peningkatan pada tahun 2017 sampai tahun 2021, Terhitung tahun 2017 sebesar 70,69 kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 71,30 dan terus meningkat pada tahun 2019 sebesar 72,03 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 72,09 kemudian pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan menjadi 72,49. Dan ini membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan provinsi jawa barat terus mengalami peningkatan di setiap tahun.

Meningkatnya angka indeks pembangunan manusia (IPM), masih terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai IPM suatu daerah. Menurut Kuncoro (2000) dalam (Ibrahim, 2021) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau daerah tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau dapat

dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Penduduk miskin memiliki kesempatan yang rendah untuk memperoleh pendidikan dan perawatan medis yang layak karena pendapatan yang mereka peroleh hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Kesehatan yang buruk menghasilkan produktivitas yang rendah dan mengakibatkan pendapatan yang rendah sehingga dapat menyebabkan kualitas pendidikan yang buruk dan indeks pembangunan manusia yang rendah.

Tingkat pengangguran terbuka juga dinilai dapat mempengaruhi tingkat indeks pembangunan manusia karena tingkat pengangguran terbuka merupakan keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya (Yanuar 2018). Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia. Pengangguran menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat tidak maksimal sedangkan tujuan akhir dari pembangunan yaitu untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian mengenai indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat telah banyak dilakukan. Seperti yang penelitian (Setiawan & Ariani, 2022) yang berjudul “Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat tahun 2015-2019”. Menggunakan variable kemiskinan, pengeluaran pemerintah di sector pendidikan dan kesehatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian wahyu terletak pada

variabel dan periode penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan variable tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruh Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat 2017-2021”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan pokok dari permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Barat 2017-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021

2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah di lakukan sebagai berikut :

1. Bagi penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.
2. Dapat memberikan informasi terhadap peneliti lain sebagai bahan referensi dalam penelitian
3. Bagi pemerintah dan instansi terkait dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang mengarah pada perbaikan, dan tambahan informasi bagi instansi terkait